

6. BIDANG HUKUM & HAM

LATIHAN SOAL SKB BIDANG HUKUM & HAM

- Putusan dapat terbagi menjadi beberapa macam tergantung dari sifat, isi, maupun fungsinya. Hal yang bukan termasuk contoh putusan yang bersifat konstitutif adalah
 - Kasus perceraian
 - Kasus pengampunan
 - Kasus kepailitan
 - Kasus pembatalan perjanjian
 - Penetapan hak perawatan anak oleh ibunya
- Dalam asas hukum acara perdata dikenal adanya istilah *ius curia novit*. Maksud istilah tersebut adalah
 - Hakim bersifat menunggu
 - Hakim dianggap tahu hukum
 - Hakim dibenarkan menjatuhkan hukuman lebih dari yang dituntut
 - Persidangan terbuka untuk umum
 - Kedua belah pihak didengar dan diperlakukan sama
- Persidangan terbuka untuk umum dimaksudkan untuk menjamin objektivitas peradilan serta pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat. Apabila hal tersebut dilanggar, putusannya bersifat
 - Inkrah
 - Batal demi hukum
 - Dapat dibatalkan
 - Mengikat salah satu pihak
 - Dapat diajukan banding
- Peradilan harus objektif. Hal yang menjadi jaminan objektivitas peradilan adalah di bawah ini, kecuali
 - Terbukanya persidangan untuk umum
 - Asas hakim majelis
 - Asas *verplichte procureurstelling*
 - Adanya *recusatie*
 - Adanya *excusatie*
- Setiap putusan peradilan harus diberikan tulisan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Konsekuensi jika tidak terdapat tulisan tersebut maka
 - Putusan tersebut dapat dibatalkan.
 - Putusan tersebut batal demi hukum.

- C. Tidak berpengaruh apa-apa.
 D. Putusannya tidak dapat dieksekusi.
 E. Putusannya kurang mengikat.
6. Pemanggilan harus sah dan patut. Yang bersangkutan harus telah menerima surat panggilan sekurang-kurangnya
 A. 1 minggu sebelum sidang
 B. 5 hari sebelum sidang
 C. 3 hari sebelum sidang
 D. 2 hari sebelum sidang
 E. 1 hari sebelum sidang
7. Untuk menjamin hak, dilakukan sita jaminan yang terbagi menjadi beberapa macam. Penyitaan terhadap barang bergerak milik pemohon adalah
 A. *Sita revindicatoir*
 B. *Sita maritaal*
 C. *Sita matrimoniaal*
 D. *Sita conservatoir*
 E. *Darden beslag*
8. Dalam sidang perdata, apabila telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut tetapi tergugat tidak hadir maka
 A. Dilakukan penundaan sidang
 B. Diputus verzet
 C. Diputus gugur
 D. Dilakukan pemanggilan ulang
 E. Diputus verstek
9. Berikut ini hal-hal yang menjadikan gugatan rekonvensi tidak dapat dilakukan, kecuali
 A. Tuntutan tentang besit tidak boleh diajukan dalam tuntutan tentang hak milik.
 B. Apabila dalam konvensi dirinya bertindak sebagai wali maka dalam rekonvensi tidak boleh bertindak selaku pribadi.
 C. Dalam perkara yang berhubungan dengan putusan.
 D. Kedua gugatan (konvensi dan rekonvensi) mempunyai dasar hubungan hukum yang sama.
 E. Apabila pengadilan negeri yang memeriksa konvensi tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa gugat konvensi.
10. Dalam hal waris, suami atau istri tidak menjadi legitimaris. Berikut ini yang bukan termasuk syarat legitimaris adalah
 A. Ahli waris tidak menolak.
 B. Harus masih hidup pada waktu pewaris meninggal.
 C. Harus ada hubungan darah.
 D. Ahli waris tidak dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan.
 E. Adanya hubungan semenda.
11. Kompetensi pengadilan yang berwenang kaitannya dengan Teori *Locus*

- Delicti*, salah satunya adalah Teori Instrumen, maksudnya adalah
- Menentukan *locus delicti* berdasarkan kelakuan.
 - Menentukan *locus delicti* berdasarkan akibat.
 - Menentukan *locus delicti* berdasarkan letak alat tersebut bekerja.
 - Menentukan *locus delicti* berdasarkan efisiensi dalam proses pengadilan.
 - Menentukan *locus delicti* berdasarkan penggunaan alat bantu.
12. Pengaturan mengenai sanksi penggelapan dan pembunuhan termasuk dalam penggolongan hukum pidana, yaitu
- Hukum Pidana Materiil
 - Hukum Pidana Formil
 - Hukum Pidana Regional
 - Hukum Pidana Sipil
 - Hukum Pidana Kodifikasi
13. Hukum pidana nasional berlaku bagi warga negara di mana pun dia berada, baik di wilayah nasional maupun tidak. Hal ini merupakan salah satu asas berlakunya hukum pidana nasional, yaitu
- Asas nasional pasif
 - Asas nasional aktif
 - Asas universal
 - Asas teritorial
 - Asas bilateral
14. Pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal
- 104
 - 310
 - 351
 - 362
 - 372
15. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal
- 1320
 - 1313
 - 1321
 - 1319
 - 1365
16. Berikut ini yang termasuk dalam tugas dan kewenangan panitera adalah
- Menetapkan hari sidang.
 - Memproses permohonan grasi.
 - Menandatangani surat penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan izin penyitaan.
 - Menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan grasi yang diterima.
 - Membagi perkara kepada para hakim atau majelis untuk disidangkan.
17. Dalam sebuah tuntutan, apa saja yang menjadi permohonan dituliskan pada bagian
- Kepala tuntutan
 - Pembukaan

- C. Posita
D. Petitum
E. Penutup
18. Terdapat beberapa perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata. Dari segi sikap hakim, pada hukum pidana adalah
A. Hakim bersifat pasif
B. Hakim bersifat aktif
C. Hakim sebagai mediator
D. Hakim lebih banyak mendengar
E. Hakim lebih menyerahkan kepada penasihat hukum
19. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat. Yang bukan termasuk empat syarat tersebut adalah
A. Tidak ada paksaan
B. Suatu hal tertentu
C. Adanya kata sepakat
D. Suatu sebab yang halal
E. Kecakapan
20. Korporasi juga merupakan subjek hukum. Sanksi pidana yang dapat diterima oleh sebuah korporasi adalah sebagai berikut, kecuali
A. Peringatan dan pengawasan
B. Denda
C. Ganti rugi
D. *Actio pauliana*
E. Pembubaran
21. Pencurian termasuk dalam delik
A. Formil
B. Materiil
C. Formil materiil
D. Absolut
E. Relatif
22. Sanksi yang didapatkan pelaku pembantu tindak pidana adalah
A. Pidana pokok
B. Pidana pokok dikurangi $\frac{1}{3}$
C. Pidana pokok dikurangi $\frac{2}{3}$
D. Pidana pokok dikurangi $\frac{1}{2}$
E. Pidana pokok dikurangi 1
23. Dalam sebuah delik dapat terjadi terdapat beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya. Berikut ini yang bukan termasuk ke dalam unsur penganjur adalah
A. Tidak ikut melakukan eksekusi.
B. Tidak memenuhi unsur delik karena tidak ikut berbuat atau tidak melakukan delik.
C. Ada provokasi.
D. Bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukan, walaupun tidak melakukannya.
E. Niat berasal dari dirinya, tetapi pelaksananya orang lain.
24. Satu orang dapat saja melakukan satu tindakan yang mengakibatkan dua atau lebih pelanggaran hukum pidana. Hal ini disebut

- A. Perbarengan
- B. Penyertaan
- C. Turut serta
- D. Limitatif
- E. Percobaan

25. Jika A pada tanggal 2 Mei mencuri, kemudian enam hari kemudian menganiaya orang, dan lima hari berikutnya membunuh, berdasarkan teori *concursum realis heterogenus*, dia akan mendapatkan ancaman pidana selama

- A. 5 tahun
- B. 2 tahun
- C. 8 bulan
- D. 9 bulan
- E. 20 tahun

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN SOAL SKB BIDANG HUKUM & HAM

1. Jawaban: E

Putusan konstitutif adalah putusan yang sifatnya menghapuskan keadaan hukum yang ada dan sekaligus menciptakan keadaan hukum yang baru.

2. Jawaban: B

Salah satu asas acara perdata adalah hakim bersifat menunggu, yaitu hakim menunggu karena jabatannya atas tuntutan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Apabila tuntutan telah masuk, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili karena alasan *ius curia novit*, yaitu hakim dianggap tahu hukum, atau lebih tepatnya hakim yang memahami hukum acara perdata.

3. Jawaban: B

Persidangan terbuka untuk umum adalah setiap orang boleh hadir dan mengikuti jalannya persidangan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 19 ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada ayat (2) UU tersebut dijelaskan bahwa jika hal tersebut dilanggar, putusannya batal demi hukum.

4. Jawaban: C

Jaminan objektivitas peradilan, sebagai berikut.

- Adanya *recusatie* (hak ingkar).
- Adanya *excusatie* (pengunduran diri).
- Terbukanya persidangan untuk umum.
- Asas hakim majelis.
- Putusan harus disertai alasan-alasan.

5. Jawaban: D

Fungsi dari kepala putusan, yaitu tulisan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah untuk memberikan *title executorial*. Konsekuensi jika tidak terdapat kalimat tersebut maka putusannya tidak dapat dieksekusi.

6. Jawaban: C

Pemanggilan harus dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh UU, yang dilakukan oleh juru sita dan disampaikan kepada yang bersangkutan di mana dirinya berdomisili. Juru sita membuat acara pemanggilan dan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang, yang bersangkutan telah menerima surat panggilan tersebut.

7. Jawaban: A

Sita jaminan dilakukan terhadap, berikut ini.

- Barang milik sendiri, meliputi:
 - ✓ Sita *revindicatoir*: penyitaan terhadap barang bergerak milik pemohon.
 - ✓ Sita *maritaal* dan *matrimonial*: terdapat pada kasus perceraian yang ditujukan terhadap harta perkawinan, bisa benda tetap maupun bergerak.
- Barang milik tergugat, yaitu:
 - ✓ Sita *conservatoir*: penyitaan terhadap barang milik debitur, bisa benda bergerak, tetap, dan barang milik debitur yang dipegang pihak ketiga.

8. Jawaban: E

Jika tergugat tidak hadir padahal telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut maka diputus verstek. Hal ini karena gugatan telah mengorbankan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga penggugat harus dihormati.

9. Jawaban: D

Tujuan dari rekonvensi, sebagai berikut.

- Apabila kedua gugatan (konvensi dan rekonvensi) mempunyai dasar hubungan hukum yang sama.
- Menghemat biaya.
- Untuk mempermudah prosedur.

- Dapat menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.

10. Jawaban: E

Ahli waris yang mendapat perlindungan hukum atau bagian mutlak yang tidak boleh diganggu gugat apabila pewaris membuat suatu wasiat disebut legitimaris. Syarat legitimaris, sebagai berikut.

- Ahli waris tidak menolak.
- Harus masih hidup pada waktu pewaris meninggal.
- Harus ada hubungan darah.
- Ahli waris tidak dinyatakan tidak patut untuk menerima warisan.

11. Jawaban: C

Teori *Locus Delicti* terbagi menjadi empat, sebagai berikut.

- Teori Kelakuan: untuk menentukan *locus delicti* berdasarkan kelakuan.
- Teori Akibat: untuk menentukan *locus delicti* berdasarkan akibat.
- Teori Alat atau Instrumen: untuk menentukan *locus delicti* tergantung di mana alat itu bekerja.
- Teori Pragmatik: dipilih yang paling mudah dan efisien dalam proses pengadilan.

12. Jawaban: A

Hukum Pidana Materiil mengatur norma tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.

13. Jawaban: B

Asas berlakunya hukum pidana terbagi menjadi:

- Asas teritorial: hukum pidana nasional berlaku terhadap pelanggaran hukum pidana yang terjadi dalam wilayah nasional suatu negara.
- Asas personal atau nasional aktif: hukum pidana nasional berlaku bagi warga negara di mana pun dia berada, baik di wilayah nasional maupun tidak.
- Asas kepentingan nasional atau nasional pasif: hukum pidana nasional suatu negara berlaku terhadap perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara lain, apabila perbuatan tersebut mengancam negara yang bersangkutan.
- Asas universal: hukum pidana nasional suatu negara berlaku terhadap perbuatan pidana dalam wilayah internasional.

14. Jawaban: D

Pasal 362 KUHP berbunyi, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

15. Jawaban: E

Pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

16. Jawaban: D

Tugas dan kewenangan panitera, sebagai berikut.

- Menyelenggarakan administrasi perkara.
- Mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, dan wakil sekretaris.
- Membuat akta-akta administrasi perkara.
- Menerima serta membuat daftar semua perkara dan permohonan grasi yang diterima.
- Membuat salinan putusan.

17. Jawaban: D

Format tuntutan, sebagai berikut.

- Kepala tuntutan: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
- Pembukaan.
- Posita: berisi dakwaan analisis yuridis fakta-fakta, saksi, terdakwa, barang bukti, petunjuk, dan urutan pasal.

- Petitum: berisi yang dimohonkan.
- Penutup.

18. Jawaban: B

SUBSTANSI	PERDATA	PIDANA
Pihak	Antara warga negara dengan warga negara	Antara warga negara dengan negara
Mediasi	Ada	Tidak ada
Sumber hukum	KUH Perdata	KUHP, KUHPA, UU lainnya
Sikap hakim	Pasif karena yang dibuktikan masalah formil	Aktif karena yang dibuktikan masalah materiil
Pembuktian	Dikenal sumpah	Sumpah tidak dikenal
Inisiatif perkara	Para pihak	Negara
Biaya	Para pihak	Negara

19. Jawaban: A

Dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, sebagai berikut.

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- Suatu hal tertentu.
- Suatu sebab yang halal.

20. Jawaban: D

Hukuman badan atau *actio pauliana* dilakukan untuk subjek hukum orang.

21. Jawaban: B

Teknik perumusan delik terbagi menjadi, sebagai berikut.

- Formil: letak pelarangannya pada kelakuan.
- Materiil: letak pelarangannya pada akibat.
- Formil materiil: letak pelarangannya tidak hanya pada akibat, tetapi juga pada kelakuannya.

Dalam hal ini, pencurian mengakibatkan hilangnya barang milik seseorang, sehingga termasuk dalam delik materiil.

22. Jawaban: B

Dalam Pasal 57 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa dalam hal pembantuan, maksimum

pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiga.

23. Jawaban: D

Unsur-unsur penganjur, sebagai berikut.

- Tidak ikut melakukan eksekusi.
- Dibataskan adanya provokasi.
- Niat bersumber dari penganjur dan dilaksanakan oleh orang lain.
- Penganjur bertanggung jawab atas anjurannya saja beserta akibatnya.
- Tidak memenuhi unsur delik karena tidak ikut berbuat atau tidak melakukan delik.

24. Jawaban: A

Syarat perbarengan (*concursum*), sebagai berikut.

- Ada dua atau lebih perbuatan pidana yang dilakukan.
- Perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh 1 orang.
- Perbuatan tersebut belum ada yang mengadili.
- Perbuatan tersebut diadili sekaligus.

25. Jawaban: E

Menurut teori *concursum realis heterogenus*, sanksi pidana diambil dari yang paling berat ancamannya. Dari ketiga delik pada soal, membunuh memiliki ancaman pidana yang paling berat, yaitu diancam paling lama 20 tahun.